

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, serta penting untuk merencanakan arah pembangunan di masa yang akan datang dalam suatu wilayah. Jika pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif, hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam perekonomian. Sebaliknya, jika angka pertumbuhannya negatif, maka menandakan adanya penurunan dalam perekonomian (Zahari, 2017). Tujuan pertumbuhan ekonomi ialah untuk memperbaiki pembangunan nasional, yang pada saatnya dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, sesuai dengan kapasitas nasional yang dapat dipengaruhi melalui sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Total PDRB suatu daerah mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah tersebut, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS Sulsel, 2015), dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik ekonomi diperoleh dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga



**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan (Persen)
Tahun 2010-2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Gambar 1.1, selama periode 2010-2023 pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan memiliki rata-rata pertumbuhan 6,4 persen. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan relatif tinggi dibandingkan dengan empat provinsi lain yang berada di Pulau Sulawesi dan ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi serta strategi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Sulawesi Selatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah untuk mempertahankannya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak bisa lepas dari peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah suatu komponen kebijakan publik, yang merupakan tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran

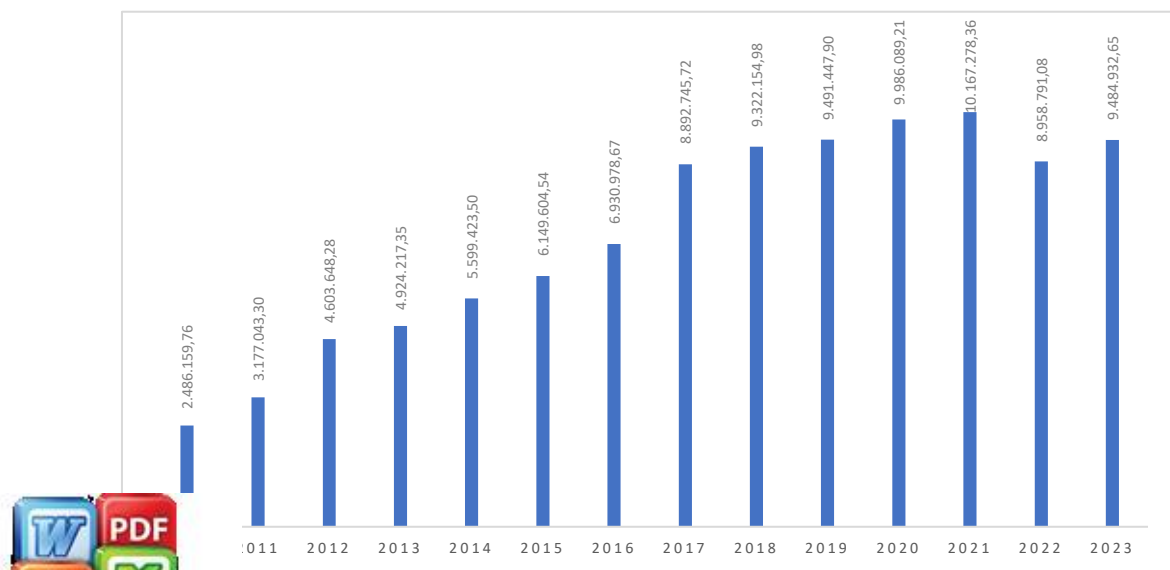


lain (Rahmawati, 2016). Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, salah satu yang dapat digunakan ialah kebijakan anggaran melalui pengeluaran pemerintah. Hal ini sangat diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif, maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah dan dapat menaikkan dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi (*long run steady state growth economy*).

Pengeluaran pemerintah daerah diatur dalam UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (8) bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dan menurut pasal 16 ayat (1), “APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah” dan ayat (2) “APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan”. Dalam hal ini anggaran belanja ialah anggaran pengeluaran daerah itu sendiri.

Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Miliar Rupiah) Tahun 2010-2023



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI



Gambar 1.2 menunjukkan pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 hingga 2023 dengan total rata-rata pengeluaran ialah 7.155.322,52 Miliar rupiah. Pengeluaran Pemerintah Sulawesi Selatan selama empat belas tahun terakhir tidak serta merta menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini dikarenakan, setiap tahunnya dalam menyusun RAPBD pemerintah daerah memiliki visi misi yang berbeda, sehingga proporsi pengeluaran pemerintah bergantung pada hal tersebut. Dalam penyusunan anggaran belanja, pemerintah juga merincikannya menurut fungsi belanjanya, adapun fungsi belanja tersebut menurut UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 ayat (5), yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Tabel 1.1 Rata-Rata Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Fungsi (Miliar Rupiah) Tahun 2010-2023

Belanja Menurut Fungsi	Rata-rata Belanja Menurut Fungsi
Pelayanan Umum	2.383,24
Ketertiban dan Keamanan	39,60
Ekonomi	704,34
Lingkungan Hidup	103,21
Perumahan & Fasilitas Umum	470,00
Kesehatan	657,29
Pariwisata & Kebudayaan	30,76
Pendidikan	2.325,71
Perlindungan Sosial	65,78

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI



Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi selatan menurut fungsi selama empat belas tahun terakhir. Adapun pengeluaran pemerintah pada fungsi pendidikan, fasilitas umum, ekonomi, dan kesehatan merupakan empat fungsi yang memiliki total rata-rata pengeluaran terbesar selama empat belas tahun terakhir. Besarnya alokasi dana pada sektor-sektor tersebut mencerminkan upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong aktivitas ekonomi, penyediaan barang publik, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keempat sektor ini didukung dengan teori Rostow dan Musgrave (1959), di mana pada tahap awal perkembangan ekonomi investasi pemerintah sangat penting, karena pemerintah harus mengadakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan segala jenis infrastruktur. Meskipun demikian, menurut teori endogen pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah dalam pembiayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh akumulasi modal lain yang dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yaitu melalui investasi pada modal fisik.

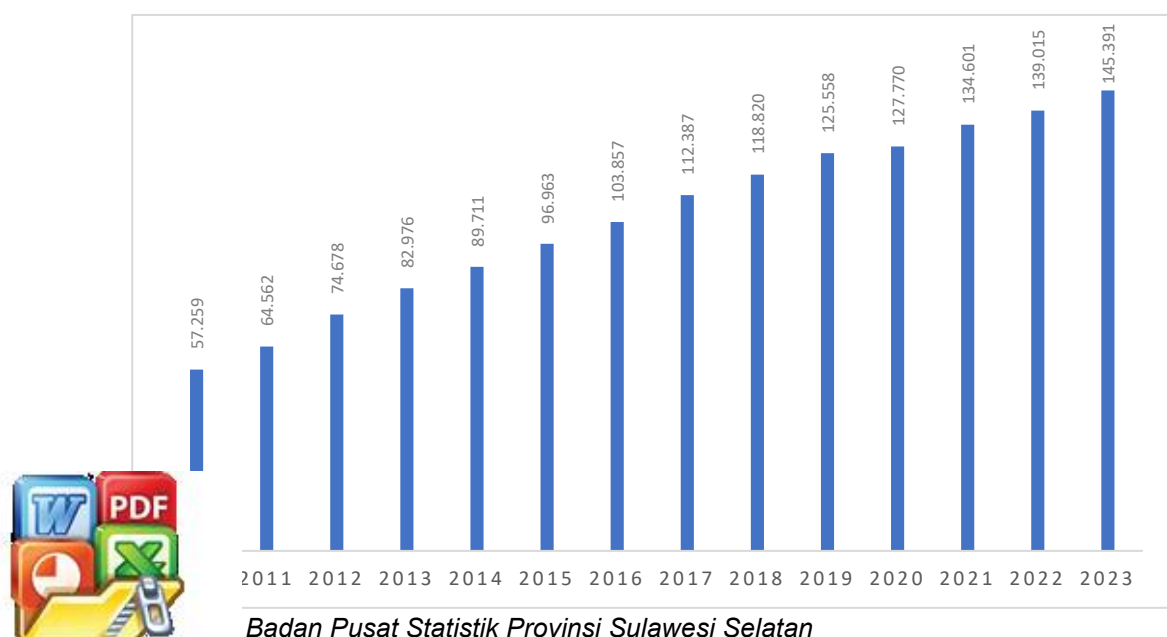
Akumulasi modal merupakan salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi suatu perekonomian. Salah satu wujud nyata dari peran modal dalam pembangunan ekonomi ialah melalui investasi, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menopang aktivitas produksi. Dalam konteks ini, peningkatan investasi pada modal fisik seperti infrastruktur, transportasi, energi, dan telekomunikasi menjadi penting karena dapat memperkuat fondasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang (Sugeng, 2021). Investasi tersebut tidak hanya memperbaiki efisiensi produksi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, karena



kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan pertumbuhan PDRB tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi di suatu daerah. Investasi dalam hal pembentukan PDRB dapat dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pembentukan Modal Tetap Bruto bertujuan untuk meningkatkan nilai produksi yang lebih besar sekaligus menambah kekayaan ekonomi di masa mendatang melalui aktivitas penanaman modal, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan. Komponen PMTB ini sangat terkait dengan faktor-faktor produksi yang bersifat jangka panjang, seperti bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. Jika PMTB tiap tahunnya mengalami peningkatan dan mencukupi, maka akan membantu perkembangan perekonomian dan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Nadya, 2023).

Gambar 1.3 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Sulawesi Selatan (Miliar Rupiah) Tahun 2010-2023

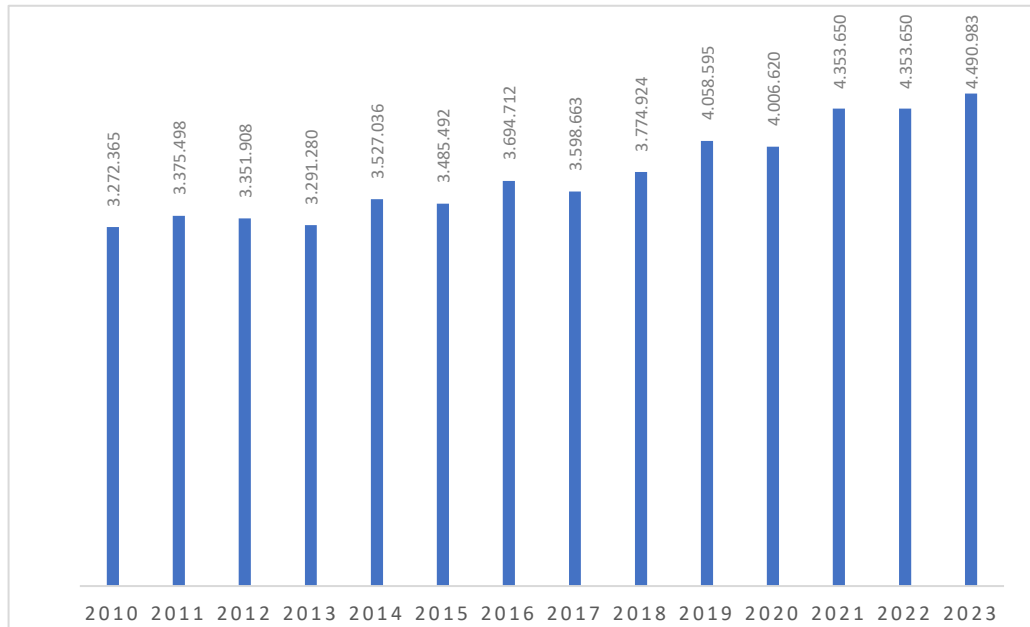


Pada Gambar 1.3 menunjukkan tren Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 hingga 2023 terus mengalami kenaikan, dari Rp57. 259 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp145 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tiap tahunnya ada peningkatan modal pada infrastruktur dan faktor produktif lainnya yang dapat menambah kapasitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, laju pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama bergerak fluktuatif, dari 8,19% pada tahun 2010, sempat mencapai 8,87% di tahun 2012, lalu menurun hingga 4,51% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PMTB terus meningkat, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu positif.

Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan tenaga kerja juga memegang peran yang sangat penting sebagai penggerak langsung aktivitas produksi (Solow, 1956), baik bersumber dari kualitas maupun kuantitas tenaga kerjanya. Tinggi rendahnya kualitas tenaga kerja dapat berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingkat partisipasi sumber daya manusia yang terlibat dalam dunia kerja atau tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (Langlang dkk, 2018). Tenaga kerja yang produktif dan berkualitas tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, tetapi juga menjadi salah satu indikator utama daya saing ekonomi daerah. Adanya peningkatan jumlah tenaga kerja dapat menjadi peluang untuk memperluas kapasitas produksi, selama penyerapan tenaga kerja berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi di suatu wilayah.



Gambar 1.4 Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan (Jiwa) Tahun 2010-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami tren peningkatan yang konsisten, terutama sejak tahun 2016 hingga 2023. Kenaikan ini secara umum sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam periode yang sama, sehingga mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika tenaga kerja bertambah dan terserap secara optimal, kapasitas produksi daerah cenderung meningkat, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, peningkatan jumlah tenaga kerja tidak serta merta menjamin percepatan pertumbuhan ekonomi jika tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas. Pengaruh positif atau negatif pertumbuhan penduduk juga sangat bergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah dalam menyerap dan



secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Oleh karena itu, dalam konteks Sulawesi Selatan, tenaga kerja memiliki peran strategis sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi, baik melalui kontribusinya dalam sektor formal maupun informal. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan dalam jumlah besar perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan, agar mampu menjawab tantangan industrialisasi dan perkembangan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, penguatan kualitas tenaga kerja menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertambahan angkatan kerja dapat berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan pengetahuan tentang perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengaitkan dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pelayanan umum, ekonomi dan kesehatan, pembentukan modal tetap bruto, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 hingga 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi selatan?



2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi selatan?

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi selatan?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi selatan?
5. Bagaimana pengaruh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi selatan?
6. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengaitkan dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengaitkan dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengaitkan dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengaitkan dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.



k mengaitkan dan menganalisis pengaruh Pembentukan Modal Tetap
) (PMTB) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Untuk mengaitkan dan menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pembuat kebijakan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan, kajian dan masukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan melalui optimalisasi pengeluaran pemerintah, peningkatan pembentukan modal tetap bruto dan pemanfaatan tenaga kerja secara efektif
2. Kalangan akademisi, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, dan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator kemajuan pembangunan dan juga menentukan arah pembangunan dimasa mendatang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi adalah tujuan nasional yang berfokus pada pemanfaatan peluang untuk meraih keuntungan. Pembangunan ekonomi yang positif menarik investor, meningkatkan modal, dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan pengangguran dan perbaikan pertumbuhan ekonomi (Annisa dkk, 2024).

Teori pertumbuhan ekonomi dalam model neoklasik Solow (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan output dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu jumlah dan kualitas tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Solow dalam teorinya menganggap bahwa penambahan tenaga kerja dan teknologi sangat penting, yang dimana output setiap pekerja dipengaruhi oleh modal setiap pekerja dan efisiensi teknologi, namun kemajuan teknologi sebagai faktor yang muncul secara terpisah dan tidak tergantung pada tenaga kerja. Model ini menunjukkan bahwa ekonomi cenderung mencapai tingkat



pendapatan yang sama, tergantung pada seberapa banyak mereka menabung dan berinvestasi. Serta, pada teorinya menunjukkan bahwa pertumbuhan jangka panjang bergantung pada kemajuan teknologi, yang menjadi kunci utama meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menurut Todaro dan Smith (2020) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin meningkat. Dalam teorinya, ada tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang penting bagi setiap masyarakat, ialah akumulasi modal, pertumbuhan jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi. Ketiganya itu saling berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal terjadi ketika sebagian pendapatan saat ini disimpan dan diinvestasikan untuk meningkatkan output dan pendapatan di masa depan, hal ini mencakup investasi modal fisik, infrastruktur, sumber daya manusia, dan peningkatan produktivitas lahan atau inti dari akumulasi modal ialah pengorbanan konsumsi saat ini demi manfaat ekonomi di masa depan. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, jika tenaga kerja yang bertambah dapat diserap dan dimanfaatkan secara produktif. Hal ini tergantung pada investasi modal dan kualitas sumber daya manusia, jika dikelola dengan baik maka peningkatan ini dapat memperluas kapasitas produksi nasional. Sedangkan kemajuan teknologi menurut Todaro pada dasarnya mencakup penemuan atau peningkatan cara dalam melakukan kegiatan produksi secara lebih efisien.

Teknologi dapat meningkatkan hasil produksi meskipun jumlah input tetap.



Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) yang dikembangkan oleh Paul M. Romer (1986) dan Robert Lucas (1988) berfokus pada

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memberikan pandangan alternatif terhadap teori pertumbuhan neoklasik tradisional. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan dari akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti inovasi, pengetahuan, dan investasi pada modal fisik dan manusia yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak. Pada teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, teori pertumbuhan endogen memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana faktor internal dan eksternal berkontribusi pada variasi dalam pertumbuhan ekonomi diberbagai negara.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan aspek penting dalam peran negara dalam perekonomian, yang mencakup pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji pegawai, program jaminan sosial, serta pembayaran bunga utang (Samuelson dan Nordhaus, 2009). Pengeluaran pemerintah juga memiliki dampak luas terhadap perkembangan teknologi dan budaya, serta memainkan peran penting dalam kemajuan ilmiah. Efisiensi dalam pengeluaran publik bergantung pada pemerintah yang mempertimbangkan manfaat dan pembiayaan program secara adil. Pada tingkat pemerintahan dapat menjalankan peran mereka secara



Menurut Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2016), perkembangan ekonomi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, menengah dan lanjut. Pada Tahap Awal, investasi pemerintah sangat penting karena pemerintah harus mengadakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, sehingga pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar. Tahap menengah terjadi pembangunan ekonomi, sehingga investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tidak tinggal landas, dan juga peranan investasi swasta sudah semakin besar. Namun, ini juga dapat menyebabkan masalah besar, dikarenakan menurut Musgrave dalam suatu proses pembangunan investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam persentase GNP akan semakin kecil, sehingga pemerintah perlu menyediakan lebih banyak barang dan jasa publik dengan kualitas yang lebih baik. Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan dari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Wagner dalam Khoiria (2020) dan Mangkoesoebroto (2016), ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah, maka akan meningkatkan pendapatan perkapita. Salah satu peranan pemerintah ialah adanya hubungan yang timbul dalam Masyarakat atau biasa disebut dengan *organic theory of the state* (pemerintah yang mempunyai wewenang untuk bebas bertindak), sehingga ini menjadi kelemahan hukum Wagner karena tidak didasarkan pada suatu teori pemilihan barang publik. Wagner menerangkan bahwa peran pemerintah semakin

karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam cat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Menurut



Wagner, terdapat tiga alasan pengeluaran pemerintah meningkat sejalan dengan peningkatan perekonomian (Solikin, 2018). Pertama, pemerintah mengeluarkan biaya untuk menjalankan fungsi administrasi dan perlindungan, dimana dengan penambahan penduduk terjadi peningkatan pengeluaran untuk menjalankan fungsi tersebut. Kedua, terdapat pengeluaran untuk budaya dan kesejahteraan, misalnya untuk pendidikan dan redistribusi pendapatan. Ketiga, perkembangan teknologi dan kebutuhan modal yang sangat besar menyebabkan sektor-sektor tertentu cenderung bersifat monopoli, sehingga mendorong peran pemerintah untuk mengambil alih sektor usaha tersebut dalam rangka menghindarkan monopoli oleh swasta. Namun, hukum Wagner tidak didasarkan pada suatu teori pemilihan barang-barang publik.

2.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pengeluaran pembangunan merupakan jenis pengeluaran yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan investasi guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam program pembangunan. Anggaran ini dialokasikan terutama untuk mendukung proyek yang tidak dapat dibiaya sendiri oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan layanan sosial yang sifatnya vital bagi kemajuan daerah maupun nasional. Dalam struktur belanja pemerintah pusat, pengeluaran pembangunan memegang peran penting karena menjadi penyumbang terbesar terhadap PMTB, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen ran dalam PDRB yang mencerminkan investasi jangka panjang pada tor produksi yang memiliki umur pakai lebih dari satu tahun. Investasi ini tabungan pemerintah, pinjaman luar negeri, tabungan domestik, dan



investasi neto luar negeri. PMTB merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena PMTB mencerminkan seberapa besar investasi yang dilakukan suatu daerah dari tahun ke tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), PMTB ialah investasi dalam bentuk faktor aset tetap yang digunakan secara berulang dalam proses produksi selama lebih dari satu tahun. Aset tetap tersebut berasal dari hasil produksi, memiliki umur pakai panjang, dan dapat diperdagangkan. PMTB dihitung dari penambahan aset tetap melalui pembelian, produksi sendiri, barter, sewa pembiayaan, hibah, atau perbaikan besar dikurangi pengurangan aset tetap akibat penjualan, barter, atau pemberian ke pihak lain. Kegiatan investasi yang membentuk PMTB meningkatkan kapasitas produksi, mendorong pertumbuhan output, serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Estimasi nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurut BPS (2023) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan dengan menjumlahkan nilai PMTB dari setiap sektor ekonomi berdasarkan lapangan usaha, di mana barang modal dinilai menurut harga pembelian yang mencakup biaya transportasi, instalasi, pajak, serta biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan, termasuk bea masuk dan pajak untuk barang impor. Sementara itu, pendekatan tidak langsung atau arus komoditas dilakukan dengan menghitung nilai barang yang diproduksi berbagai sektor ekonomi (*supply*) yang kemudian dialokasikan sebagai barang modal.



2.1.4 Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam pembangunan nasional menjadi faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun konsumen. (Mahendra, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sementara itu, BPS (2024) mendefinisikan tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang berumur 15-64 tahun dan mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Undang-Undang tersebut juga mengatur perlindungan khusus bagi tenaga kerja di bawah usia minimal. Pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa tenaga kerja di bawah usia minimal diizinkan untuk bekerja dalam skala terbatas dan syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi waktu kerja yang lebih pendek, upah yang setara dengan tenaga kerja dewasa, dan perlindungan khusus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Manurut Suparmoko (2016), tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Dari sisi kuantitas, penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak dalam proses produksi umumnya akan meningkatkan output yang dihasilkan. Sementara itu, peningkatan mutu tenaga kerja dapat menunda penurunan total produksi, sehingga penambahan jumlah tenaga kerja baru diperlukan ketika telah mencapai kapasitas tenaga kerja yang lebih maksimal.



Produktivitas tenaga kerja diartikan sebagai ukuran kemampuan pekerja menghasilkan output yang lebih banyak dan berkualitas dalam jumlah yang

sama, sehingga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang berkelanjutan. Menurut Shapiro (2022), produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain *human capital* dan *technological change*. *Human Capital* mencakup pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang diperoleh pekerja melalui pendidikan dan pelatihan. *Technological change* meliputi penemuan baru dan penerapannya dalam produk maupun layanan yang mampu mempercepat proses kerja, meningkatkan kualitas hasil, serta mengurangi biaya produksi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja berhubungan erat dengan pertumbuhan PDB per kapita dan menjadi penentu utama tingkat upah rata-rata di suatu perekonomian dalam jangka panjang.

Dalam Borjas (2020), menjelaskan teori penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ialah hubungan antara jumlah tenaga kerja yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat upah. Keputusan individu untuk bekerja ditentukan oleh perbandingan antara manfaat finansial yang diperoleh dan nilai waktu luang yang dikorbankan. Individu hanya akan memasuki pasar kerja jika tingkat upah pasar melebihi *reservation wage*, yaitu upah minimum yang membuatnya mau bekerja. Semakin tinggi tingkat upah maka akan semakin tinggi jumlah penawaran tenaga kerja (Arida, dkk 2015). Sementara itu, permintaan tenaga kerja ialah tenaga kerja yang jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan pada berbagai tingkat upah. Permintaan ini ditentukan oleh perbandingan antara nilai tambah yang dihasilkan tenaga kerja dengan biaya yang harus dibayarkan. Hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja bersifat terbalik, sehingga ketika upah naik, permintaan tenaga kerja cenderung menurun, sebaliknya. Dalam jangka pendek, jumlah modal dianggap tetap sehingga



penyesuaian permintaan tenaga kerja terbatas, sedangkan dalam jangka panjang perusahaan dapat menyesuaikan seluruh input produksi, sehingga permintaan tenaga kerja menjadi lebih responsif.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja negara yang sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 tentang sistem pendidikan nasional dan hal ini menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan juga golongan miskin yang ada. Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari pada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*, yang dimana modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Sasongko, 2021). Asumsi yang digunakan dalam teori ini ialah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi (Ladung, 2018).

Kemudian penelitian yang dilakukan Anggreani (2017) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, menemukan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, maka akan meningkatkan modal



yang nantinya akan meningkatkan produktivitas sehingga PDB Indonesia meningkat. Namun, tidak dapat dipungkiri meskipun peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan meningkat tiap tahunnya, terkadang

belum cukup kuat untuk memberikan dampak nyata di daerah bersangkutan. Salah satu penyebabnya ialah rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan, terutama di daerah pedalaman yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur dan akses layanan pendidikan. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia berpendidikan dalam sektor-sektor produktif juga membuat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lemah. Akibatnya, meskipun pendidikan memiliki potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi, pada periode penelitian ini kontribusinya belum dirasakan secara signifikan di daerah tersebut.

2.2.2 Pengaruh Belanja Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah pada bidang pelayanan umum adalah belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk menyediakan fasilitas publik yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Ketersediaan fasilitas publik baik itu barang maupun jasa akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat bahkan swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Subandi, 2014). Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.102/PMK.02/2018 yaitu tentang klasifikasi belanja pada bidang pelayanan umum yaitu lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri, bantuan luar negeri, pelayanan umum, penelitian dasar dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), utang pemerintah, pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan pelayanan umum dan lainnya.



Pengeluaran pemerintah di bidang pelayanan umum memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dialokasikan secara tepat sasaran dan merata. Penyediaan fasilitas publik seperti infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih menjadi fondasi penting bagi kelancaran aktivitas ekonomi, peningkatan produktivitas, dan daya saing daerah. Investasi fisik yang memadai mampu memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, alokasi anggaran yang optimal pada sektor pelayanan umum berperan langsung dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat.

2.2.3 Pengaruh Belanja Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan investasi pemerintah karena pengeluaran pemerintah bidang ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, irigasi, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang akan memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan pengeluaran pemerintah dibidang ekonomi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.102/PMK.02/2018 yaitu belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan perdagangan, pengembangan usaha, koperasi, dan usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, pengairan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, telekomunikasi dan informatika, penelitian, dan pengembangan ekonomi.



Pengeluaran pemerintah dibidang ekonomi dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja ekonomi daerah dan dapat memperbaiki

kesejahteraan masyarakat dikarenakan pengeluaran pemerintah dibidang ekonomi ini hampir seluruh bidang berupa investasi dimana dampak investasi tersebut baru akan dapat dilihat pada jangka panjang meliputi belanja untuk fasilitas dan prasarana (Danillah, 2024).

Pengeluaran pemerintah dibidang ekonomi memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika anggaran dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran. Anggarini, dkk (2023) menemukan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah di sektor ekonomi, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh efisiensi anggaran, kondisi infrastruktur, dan koordinasi antar instansi daerah. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ketika diarahkan pada subsektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan output dan produktivitas perekonomian.

2.2.4 Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan manusia, dimana kesehatan menjadi salah satu dimensi penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah meningkatkan derajat kesehatan melalui pengeluaran di sektor kesehatan yang mencakup pelayanan, obat dan perbekalan, serta pembangunan fasilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah berkewajiban mengalokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji. Sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah,



dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji untuk kesehatan sebagai bentuk investasi modal manusia yang pada akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alokasi investasi

pemerintah di bidang kesehatan merupakan jenis investasi dalam jangka panjang, sehingga dalam jangka pendek belum dapat dirasakan manfaatnya, artinya bahwa perlu periode waktu yang cukup lama untuk dapat menciptakan produktivitas sumber daya manusia yang baik yang merupakan implikasi dari adanya kualitas pelayanan kesehatan yang baik juga.

Todaro dan Smith (2020), menegaskan bahwa kesehatan penduduk yang baik menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena masyarakat yang sehat dapat berkontribusi optimal pada aktivitas produksi dan inovasi. Hal ini juga sejalan dengan *human capital theory*, yang di mana investasi pada Kesehatan meningkatkan kemampuan fisik dan mental tenaga kerja, sehingga produktivitas serta output ekonomi suatu daerah ikut terdongkrak. Pernyataan itu juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasution, dkk (2021), yang dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terealisasi secara efektif setiap tahun, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan bukan hanya tanggung jawab sosial pemerintah, tetapi juga strategi ekonomi yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan.

2.2.5 Pengaruh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan investasi fisik yang direalisasikan pada bangunan maupun alat-alat transportasi. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



tan PMTB mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penambahan ; produksi dan efisiensi perekonomian. Aktivitas investasi dalam PMTB menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat,

serta mendorong pertumbuhan permintaan agregat yang pada akhirnya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. PMTB mempresentasikan besarnya investasi yang masuk ke dalam perekonomian, yang mampu mendorong peningkatan produktivitas, memperbaiki efisiensi, serta membuka peluang kerja baru. Aktivitas investasi ini juga menstimulasi konsumsi, mendukung pertumbuhan secara keseluruhan, dan memperluas kapasitas produksi serta daya saing perekonomian.

Melalui pengembangan infrastruktur dan sarana produksi yang lebih memadai, PMTB meningkatkan efisiensi pada proses produksi, distribusi, dan layanan. Dalam jangka panjang, PMTB memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan membentuk fondasi bagi pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas serta kelancaran arus barang dan jasa. Kebijakan PMTB berpotensi menjadi sarana efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan seluruh wilayah di Indonesia sekaligus berfungsi sebagai pendorong pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.

2.2.6 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tenaga kerja berperan sebagai salah satu faktor produksi utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar domestik, dan penguatan aktivitas ekonomi. Peran ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dari sisi kuantitatif, pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif akan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja.

Semakin besar jumlah angkatan kerja yang dapat terserap di pasar, semakin besar



kapasitas produksi yang dapat dihasilkan dalam suatu perekonomian. Tenaga kerja terserap akan berdampak kepada peningkatan produktivitas nasional, yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Aryanto dan

Handaka, 2017). Dengan demikian, tenaga kerja berkontribusi dalam memperluas pasar domestik. Hal ini sejalan dengan dengan teori pertumbuhan neoklasik solow (1956) yang menekankan laju pertumbuhan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena semakin banyak tenaga kerja yang bekerja maka kemampuan menghasilkan output semakin tinggi (Hellen dkk., 2018).

Dari sisi kualitatif, peningkatan mutu tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan penguasaan keterampilan akan menjaga serta meningkatkan produktivitas ekonomi yang kuat secara fundamental dimasa yang akan datang (Bado, 2016). Kualitas tenaga kerja yang baik memungkinkan perekonomian memanfaatkan tenaga kerja secara lebih efektif dan efisien. Dampak positifnya juga sangat bergantung pada dukungan faktor penunjang lain seperti ketersediaan modal, teknologi, dan infrastruktur. Dengan demikian, tenaga kerja tidak hanya berperan sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai konsumen yang menentukan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional (Mahendra, 2019).

2.3 Studi Empiris

Bagian ini, berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan penelitian. Adapun penelitian-penelitian sebagai berikut:

Kemudian penelitian yang dilakukan Puspitasari, (2019) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini menandakan bahwa



tingginya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mampu meningkatkan sarana dan sistem pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Sasongko, dkk (2021) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai positif, namun tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan alokasi anggaran pendidikan cenderung memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik untuk memberikan kontribusi nyata pada peningkatan ekonomi daerah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Angraini, dkk (2023) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pelayanan umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dana yang dialokasikan untuk kegiatan administrasi pemerintah, keamanan, dan ketertiban umum memang penting untuk menjalankan negara. Namun, dampaknya tidak secara langsung memacu kegiatan ekonomi di masyarakat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2017) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penemuan ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan aset fisik lainnya terbukti secara nyata mampu mendorong kegiatan ekonomi secara nasional.



Penelitian yang dilakukan oleh Angraini, dkk (2023) bahwa dalam
nya pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi berpengaruh positif dan
ifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini

menunjukkan meskipun ada indikasi dampak positif pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kontribusinya belum cukup kuat secara statistik untuk dianggap sebagai pendorong utama perekonomian di Provinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Inayah (2023), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi sektor pertanian khususnya pada subsektor hortikultura, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa efektivitas belanja pemerintah di sektor pertanian bervariasi antar subsektor, dengan beberapa diantaranya memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan output ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, dkk (2019), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pada sektor kesehatan di tingkat kota dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata, hal ini juga terjadi karena penyaluran pengeluaran pemerintah dilakukan secara efektif dan efisien oleh pemerintah setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rotinsulu dan Kawung (2018), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Penemuan ini menandakan adanya kondisi unik di mana peningkatan belanja n justru berkorelasi dengan perlambatan ekonomi di Provinsi Sulawesi



Utara. Hal ini bisa terjadi jika anggaran tersebut tidak dikelola secara efisien sehingga banyak kebocoran yang tidak tepat sasaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Riani dan Iryani (2023), menemukan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki hubungan dan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin banyak investasi yang masuk, semakin kencang pula laju perekonomian di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsani, dkk (2025), menemukan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Artinya, dalam periode penelitian tersebut, suntikan modal investasi belum mampu memberikan dorongan yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, bahkan ada kecenderungan kecil untuk menghambat. Hal ini juga diakibatkan karena sebuah investasi besar membutuhkan beberapa tahun sebelum dampaknya benar-benar terasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Winston (2017), menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin banyak orang yang terlibat dalam proses produksi, semakin besar pula nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan produktif menjadi modal penting bagi daerah untuk menarik investasi dan meningkatkan kapasitas industrinya.



Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2019), menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif, tetapi signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Ini berarti, penambahan jumlah pekerja justru berkolerasi dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena masalah kualitas sumber daya manusia, seperti produktivitas per pekerja yang sangat rendah. Akibatnya, banyak pekerja yang tidak bisa berkontribusi maksimal terhadap perekonomian.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka Penulis membuat kerangka pikir dengan variabel-variabel independen adalah pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pelayanan umum, ekonomi dan kesehatan, PMTB, dan tenaga kerja. Sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi di sektor pendidikan. Pengeluaran ini diasumsikan dalam memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pengeluaran pemerintah di bidang pelayanan umum berkaitan dengan fungsi administrasi pemerintah, penyediaan layanan dasar, dan operasional kelembagaan negara. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan produksi, efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan umum dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi meliputi belanja untuk sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, dan infrastruktur ekonomi. Belanja ini sangat penting dalam menciptakan output ekonomi baru, lapangan kerja dan



distribusi pendapatan yang lebih merata, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Belanja ini berperan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

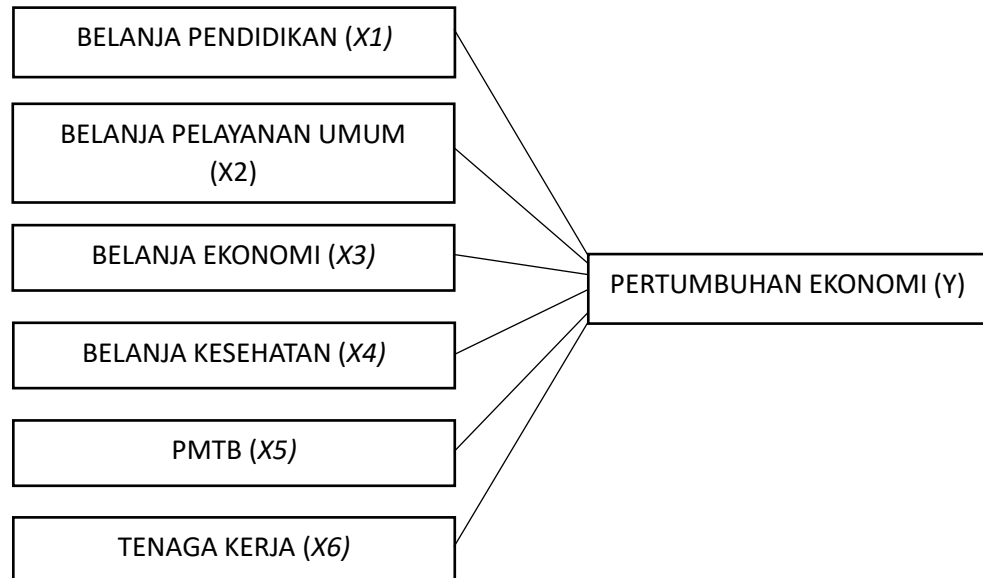
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencerminkan investasi dalam aset tetap seperti infrastruktur, mesin, dan peralatan yang menunjang aktivitas produksi. PMTB berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja yang berperan aktif dalam proses produksi barang dan jasa. Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja berpengaruh besar terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat digambarkan dalam kerangka konseptual berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, kajian Pustaka, dan kerangka konseptual maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
2. Diduga pengeluaran pemerintah dibidang pelayanan umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
3. Diduga pengeluaran pemerintah dibidang ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
4. Diduga pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
5. Diduga Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.



Diduga tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.